

Pengaruh nilai tukar petani, indeks pembangunan manusia dan PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera

Ukat Firmansyah* ; Junaidi; Erni Achmad

Ekonomi Pembangunan, Fak. Ekonomi & Bisnis Universitas Jambi

**E-mail korepondensi: ukat_firman@yahoo.co.id*

Abstract

This study aims to analyze the effect of the farmer's exchange rate, Human Development Index, and GRDP of the agricultural sector on the inequality of income distribution in the provinces on the island of Sumatra. The study used panel data from the provinces on the island of Sumatra from 2015 to 2019. The analysis tool uses a panel data regression model. The analysis found that simultaneously the exchange rate of farmers, The Human Development Index, and the GRDP of the agricultural sector had a significant effect on the inequality of income distribution. Partially, the farmer's exchange rate and the Human Development Index have a negative effect on income distribution inequality, while the GRDP of the agricultural sector has no significant effect

Keywords: *Inequality of income distribution, farmer's exchange rate, Human Development Index, GRDP, agricultural sector.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai tukar petani, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian menggunakan data panel provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2015-2019. Alat analisis menggunakan model regresi data panel. Hasil analisis menemukan bahwa secara simultan nilai tukar petani, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara parsial, nilai tukar petani dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan PDRB sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: Ketimpangan distribusi pendapatan, nilai tukar petani, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB sektor pertanian.

PENDAHULUAN

Ketimpangan antara daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan daerah. Ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Tambunan menyatakan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada suatu daerah tertentu secara langsung berdampak pada ketimpangan pendapatan antar daerah sehingga tercipta kondisi dimana daerah yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi akan lebih mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakatnya sehingga masyarakatnya relatif lebih makmur, sementara disisi lain daerah yang bukan merupakan pusat kegiatan ekonomi hanya mampu memberikan pendapatan yang rendah sehingga berakibat relatif rendah pula kemakmuran masyarakatnya.

Pulau Sumatera yang merupakan bagian dari Indonesia yang terdiri dari 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung tidak terlepas dari masalah ketimpangan ekonomi dan pendapatan.

Tabel 1. Indeks Gini Rasio Provinsi Pulau Sumatera 2015-2019

Provinsi	Gini Rasio					Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	
Aceh	0,330	0,333	0,329	0,325	0,319	0,327
Sumatera Utara	0,336	0,319	0,315	0,318	0,317	0,321
Sumatera Barat	0,340	0,330	0,318	0,321	0,306	0,323
Riau	0,366	0,347	0,325	0,327	0,334	0,340
Jambi	0,352	0,347	0,334	0,332	0,322	0,337
Sumatera Selatan	0,360	0,350	0,360	0,360	0,330	0,352
Bengkulu	0,373	0,355	0,350	0,358	0,335	0,354
Lampung	0,364	0,361	0,333	0,336	0,330	0,345
Kep. Bangka Belitung	0,280	0,280	0,282	0,281	0,269	0,278
Kep. Riau	0,350	0,350	0,345	0,330	0,340	0,343

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Saat ini, ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Provinsi yang ada di pulau Sumatera tercatat berada pada tahap ketimpangan sedang berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Oshima (Adil, dkk. 2016), jika dilihat dari data rata-rata nilainya 5 tahun terakhir. Ketimpangan yang paling tinggi tercatat berada di provinsi Bengkulu dengan nilai rata-rata 0,354. Secara berurutan disusul oleh provinsi Sumatera selatan dengan nilai rata-rata indeks gininya 0,352, Provinsi Lampung dengan nilai 0,345, Provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata nilai gini 0,343, Provinsi Riau dengan nilai 0,340, Provinsi Jambi 0,337, Provinsi Aceh 0,327, Provinsi Sumatera Barat 0,323, Provinsi Sumatera Utara 0,321, dan terakhir yang paling rendah ketimpangannya berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rata-rata nilai gininya 0,278. Dari data gini tersebut dapat diketahui bahwasanya persebaran kegiatan perekonomian di Provinsi-Provinsi yang ada di pulau Sumatera masihlah belum merata.

Ada banyak faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan. Dalam konteks pengujian distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Sumatera, penelitian ini membatasi atas beberapa faktor dominan yaitu nilai tukar petani, indeks pembangunan manusia dan PDRB sektor pertanian

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk panel selama 5 tahun, yaitu data provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2015-2019. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Alat analisis menggunakan regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$KDP_{it} = \beta_0 + \beta_1 NTP_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PDRBSP_{it} + \epsilon_{it}$$

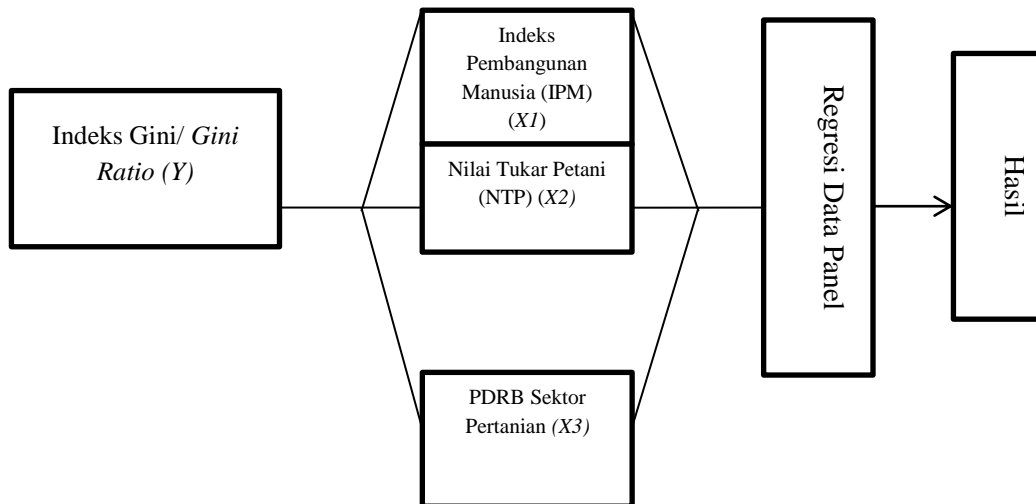
Dimana :

KDP : Ketimpangan distribusi pendapatan (indeks gini)

NTP : Nilai tukar petani

- IPM : Indeks pembangunan manusia
- PDRB SP : PDRB Sektor pertanian
- β_0 : Intersep
- β_1 hingga β_3 : Koefisien
- e : standard error

Persamaan diatas dapat diilustrasikan seperti Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1. Skema Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian model regresi data panel yaitu uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM) maka diperoleh model terbaik yang bisa digunakan dalam penelitian ini adalah model Random Effect Model (REM) dengan hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil estimasi regresi data panel dengan Metode REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.086673	0.095143	11.42145	0.0000
NTP?	-0.000879	0.000352	-2.501703	0.0160
IPM?	-0.009458	0.001253	-7.546853	0.0000
PDRB?	-2.32E-11	2.04E-10	-0.113998	0.9097
Random Effects (Cross)				
ACEH--C	-0.006871			
SUMUT--C	-0.010831			
SUMBAR--C	-0.003462			
RIAU--C	0.021444			
JAMBI--C	0.000258			
SUMSEL--C	-0.001217			
BENGKULU--C	0.014652			
LAMPUNG--C	-0.002865			
KEPBABEL--C	-0.057679			
KEPRI--C	0.046571			
R-squared	0.588543	Mean dependent var	0.040403	
Adjusted R-squared	0.561709	S.D. dependent var	0.011083	
S.E. of regression	0.007337	Sum squared resid	0.002476	
F-statistic	21.93261	Durbin-Watson stat	1.865405	
Prob (F-statistic)	0.000000			

Nilai F hitung sebesar 21.93261 dengan probabilitas sebesar $(0.000000) < \alpha = 0,05$. Artinya secara simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan nilai tukar petani, indeks pembangunan manusia dan PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 0.588543. Hal ini berarti variasi perubahan (naik ataupun turunnya) variabel ketimpangan distribusi pendapatan periode 2015 –2019 mampu dijelaskan dengan baik oleh variabel nilai tukar petani (IPM), indeks pembangunan manusia (IPM) dan PDRB sektor primer yaitu sebesar 58%. Sedangkan sisanya sebesar 42% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian.

Variabel NTP memiliki nilai t hitung sebesar -2.501703 dengan probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha = 0,05$. Ini berarti NTP secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Rozali (2020), Atif et al (2012); Cerdeiro dan Komaromi (2017); serta Santos dan Paulino (2012)

Variabel IPM memiliki nilai t hitung sebesar -7.546853 dengan probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha = 0,05$. Ini berarti IPM secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Selanjutnya, mengacu pada nilai koefisiennya menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai IPM sebesar satu persen akan menurunkan indeks ketimpangan distribusi pendapatan sebesar -0,009458 persen.

Fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mengatasi ketimpangan pendapatan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Yasmeen dkk (2011), Sudarlan (2015) serta De Mendonça & Da Fonseca (2012).

Variabel PDRB sektor pertanian memiliki nilai t hitung sebesar -0.113998 dengan probabilitas sebesar $0.9097 > \alpha = 0,05$. Ini berarti bahwa PDRB sektor pertanian secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Fakta tidak signifikannya pengaruh PDRB pertanian ini terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa peningkatan produksi sektor pertanian di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara optimal. Temuan ini sejalan dengan temuan Niswah (2017). Namun demikian, temuan ini berbeda dengan temuan Yasrizal dan Hasan (2016), Ikhsan dkk (2019) Kurniawan dan Sugianto (2013) yang menunjukkan peran penting PDRB sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Selama periode 2015-2019 ketimpangan distribusi pendapatan antar provinsi-provinsi di Pulau Sumatera relatif bervariasi baik dari sisi nilainya maupun dari perkembangannya. Dari tiga variabel yang diuji, ketimpangan distribusi pendapatan ini secara signifikan dipengaruhi dipengaruhi nilai tukar petani dan Indeks Pembangunan Manusia. Meskipun demikian, PDRB sektor pertanian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa produksi sektor pertanian di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara optimal.

Saran

Pemerintah melalui kebijakannya terhadap sektor pertanian hendaknya memperhatikan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat petani, agar dapat terimplementasikan dengan baik pada setiap provinsi di Pulau Sumatera sehingga

perekonomian dapat terstimulus dengan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani dan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Pembangunan manusia tidak kalah pentingnya dengan pembangunan infrastruktur. Bahkan pembangunan manusia harus lebih diutamakan untuk tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lagi sektor-sektor yang mampu meningkatkan kualitas SDM masyarakat khususnya dibidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk menjaga dan meningkatkan nilai PDRB setiap tahunnya, diperlukan konsistensi dan kebijakan peningkatan pada sektor-sektor unggulan yang menjadi sumber utama pertumbuhan, serta peningkatan mutu tata kelola sistem kelembagaan untuk meningkatkan nilai PDRB secara keberlanjutan pada setiap provinsi di Pulau Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, P., Eliza, E. & Tarumun, S. (2016). *Distribusi pendapatan petani kelapa sawit pola swadaya di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu* Palm. Jom Faperta, 3(2), 1–9.
- Atif, S.M., Srivastav, M., Sauytbekova, M. & Arachchige, U. K. (2012). *Globalization and Income Inequality: A Panel Data Analysis of 68 Countries*. www.econstor.eu diunduh pada tanggal 20 Pebruari 2019
- BPS. (2020). Gini ratio menurut Provinsi & Daerah. <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>. Diakses Pada Senin, 8 November 2021 Pukul 20.30
- BPS (2020). Nilai tukar petani menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/indicator/22/10/1/ntp-menurut-provinsi.html> Diakses pada Senin, 8 November 2021 Pukul 20.40
- BPS (2020). Indeks pembangunan manusia menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>. Diakses pada Senin November 2021 Pukul 20.50
- Cerdeiro, D. & Andras, K. (2017). *The Effect of Trade on Income and Inequality: a Cross-Sectional Approach*. International Monetary Fund
- De Mendonça, H.F. & Da Fonseca, A.O. (2012). Corruption, income, and rule of law: empirical evidence from developing and developed economies. *Brazilian Journal of Political Economy*, 32(2), 305-314
- Ikhsan, A., Ariusni, A. & Putri, D. (2019). Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Dan Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3), 731-738
- Kurniawan, B., & Sugiyanto, F. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri, dan Pertanian serta Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002 - 2010. *Diponegoro Journal of Economic*, 2(1), 1-14.
- Niswah, F. (2017). Analisis Pengaruh Variabel Struktur Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Kredit Investasi, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provisnis Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(1)
- Rozali, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Implikasinya terhadap Kemiskinan di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 1-16
- Santos, A. U. & Paulino. (2012). *Trade, Income Distribution and Poverty in Developing Countries: A survey*. Discussion Papers No. 207. United Nations Conference on Trade and Development

- Sudarlan, S. (2015). Contribution Of Human Development Index On Per Capita Income Growth And Poverty Alleviation In Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(8), 173-178
- Yasrizal, Y. & Hasan, I. (2016). Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kesempatan Kerja Di Indoneisa. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 16(1), 54 - 64
- Yasmeen, G., Razia, B. & Bahaudin G. M. (2011). Human Development Challenges and Opportunities in Pakistan: Defying Income Inequality and Poverty. *Journal of Business Studies Quarterly*, 2(3), 1-12